



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

e-klipping

*Kumpulan Berita Harian Media Online
(ePaper)*

SUBJEK

HUKUM DAN APARATUR

Selasa, 20 Agustus 2024

**BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN
Perpustakaan
2024**

Daftar Isi

1. SEMBILAN FRAKSI SEPAKATI RUU RPJPN 2025 – 2045 DIBAHAS KE RAPAT PARNIPURA – *Media Online Investor Daily*

INVESTOR DAILY

INDONESIA

SELASA, 20 AGUSTUS 2024

Sembilan Fraksi Sepakati RUU RPJPN 2025-2045 Dibahas ke Rapat Paripurna

JAKARTA, ID – Sembilan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RUU RPJPN) 2025-2045, ke tahap Rapat Paripurna (Tingkat II). Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang berlangsung pada Senin (19/8/2024).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wihadi Wiyanto mengajukan pertanyaan kepada para peserta rapat mengenai kelanjutan pembahasan RUU RPJPN. Pertanyaan ini disambut dengan persetujuan oleh seluruh fraksi yang hadir.

“Apakah hasil pembahasan RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan?” tanya

Wihadi, yang kemudian dijawab dengan suara bulat, “Setuju.”

Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri BPN/Kepala Bappenas yang mewakili pemerintah. Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi, yang juga Ketua Panja, menyampaikan laporan hasil kerja Panja terkait RUU RPJPN. Dalam laporannya, Baidowi mengungkapkan bahwa pembahasan RUU ini telah dilakukan melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para pakar pada 13 Maret 2024 dan Rapat Kerja bersama Pemerintah pada 1 Juli 2024. Setelah itu, Panja melanjutkan pembahasan secara intensif dalam beberapa rapat pada bulan Juli 2024.

RUU RPJPN ini merupakan usulan inisiatif dari pemerintah dengan tujuan menyusun kerangka pembangunan jangka panjang nasional hingga tahun 2045. RUU ini terdiri atas enam bab, 21 pasal,

dan lampiran yang mengatur berbagai aspek pembangunan nasional.

Dalam pandangan fraksi-fraksi yang disampaikan pada rapat tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya RUU ini dalam menyelesaikan berbagai permasalahan seperti ketahanan pangan dan degradasi lingkungan, meskipun mereka juga menggarisbawahi beberapa hal yang perlu dioptimalkan. Fraksi Partai Golkar menekankan pentingnya Ibu Kota Negara (IKN) sebagai target nasional, sementara Fraksi Partai Gerindra menyoroti visi Indonesia Emas 2045.

Fraksi-fraksi lain seperti Partai NasDem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP juga menyatakan persetujuan mereka untuk melanjutkan pembahasan RUU ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku hingga akhirnya disahkan menjadi undang-undang. **(th)**